



dpmptsp
KABUPATEN MAGELANG

BerAKHLAK

Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif



Buku Panduan Penyusunan LKPM

KABUPATEN MAGELANG | 2025



dpmptsp_kabmagelang



085 888 6666 31



(0293) 788 249



DAFTAR ISI



1 Dasar-Dasar LKPM

2 LKPM : Jadwal, Sanksi, dan Manfaat bagi Pelaku Usaha

3 Panduan Praktis Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)

4 Tanya Jawab LKPM

5 Dukungan DPMPTSP





Dasar-Dasar Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)

A. APA ITU LKPM?

Berdasarkan Peraturan BKPM Nomor 5 tahun 2025 LKPM laporan mengenai perkembangan realisasi Penanaman Modal dan permasalahan yang dihadapi Pelaku Usaha yang wajib dibuat dan disampaikan secara berkala.

Dengan LKPM, pemerintah bisa tahu:

1. Apakah usaha sudah berjalan sesuai rencana?
2. Apakah ada kendala yang dialami pelaku usaha?
3. Apakah ada kebutuhan dukungan dari pemerintah, misalnya soal infrastruktur, tenaga kerja, atau pasar?

Bagi pemerintah, LKPM menjadi alat penting untuk memantau investasi di daerah. Bagi pelaku usaha, LKPM menjadi bukti kepatuhan dan kontribusi dalam capaian target realisasi investasi.

B. DASAR HUKUM LKPM

Dasar hukum yang menjadi acuan dalam pelaporan LKPM adalah sebagai berikut :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
2. Peraturan BKPM Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pedoman Dan Tata Cara Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Dan Fasilitas Penanaman Modal Melalui Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (*Online Single Submission*).

C. SIAPA YANG WAJIB MENYAMPAIKAN LKPM?

Berdasarkan Peraturan Kepala BKPM Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pedoman Dan Tata Cara Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Dan Fasilitas Penanaman Modal Melalui Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (*Online Single Submission*), semua pelaku usaha yang sudah punya izin usaha dari OSS dan menjalankan kegiatan usahanya, wajib membuat Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM). Laporan ini berisi informasi tentang perkembangan usaha, seperti realisasi investasi, jumlah tenaga kerja, serta kendala yang dihadapi.

Kewajiban ini berlaku untuk usaha kecil, menengah, dan besar, baik penanaman modal dalam negeri (PMDN) maupun penanaman modal asing (PMA). Jadi, kalau usaha sudah terdaftar di OSS dan masuk kategori tersebut, wajib lapor LKPM secara berkala.

Namun, ada juga usaha yang tidak wajib membuat LKPM, yaitu:

1. Perbankan dan lembaga keuangan non-bank
2. Asuransi
3. Hulu migas.

Tujuan laporan LKPM adalah membantu pemerintah memantau perkembangan usaha di daerah. Dengan laporan ini, pemerintah bisa tahu kendala apa yang dihadapi pelaku usaha, lalu mencari solusi. Selain itu, pelaku usaha yang rajin LKPM lebih mudah mendapatkan dukungan, fasilitasi, atau insentif dari pemerintah.

D. TAHAPAN PELAPORAN LKPM

1. Tahap Konstruksi (Persiapan)

Tahap ini berlaku untuk usaha yang masih dalam masa pembangunan atau persiapan.

Contohnya: usaha yang sedang membangun gedung pabrik, merenovasi toko, membeli mesin, atau baru merekrut tenaga kerja. Pada tahap ini, pelaku usaha cukup melaporkan hal-hal berikut:

- Realisasi belanja modal, yaitu jumlah uang yang sudah digunakan untuk pembangunan, pembelian mesin, kendaraan, atau peralatan lain.
- Jumlah tenaga kerja yang sudah direkrut, meskipun usaha belum berjalan penuh, tetap harus dicatat siapa saja yang sudah mulai bekerja.
- Permasalahan yang dihadapi, misalnya keterlambatan pengiriman mesin, kendala perizinan, atau masalah pendanaan.

➡ Jadi, meskipun usaha belum mulai produksi, laporan tetap wajib dibuat agar pemerintah tahu perkembangan persiapan usahanya.

2. Tahap Operasional (Produksi)

Tahap ini berlaku jika usaha sudah berjalan dan mulai menghasilkan barang atau jasa.

Contohnya: usaha kuliner yang sudah mulai jualan, usaha konveksi yang sudah produksi baju, atau homestay yang sudah menerima tamu. Pada tahap ini, yang harus dilaporkan adalah:

- Jumlah produksi atau penjualan, misalnya berapa unit barang yang diproduksi, atau omzet penjualan dalam periode tersebut.
- Jumlah tenaga kerja, baik penambahan maupun pengurangan dibanding periode sebelumnya.
- Realisasi investasi, yaitu penambahan modal baru seperti pembelian bahan baku, gaji karyawan, biaya sewa, atau tambahan peralatan produksi.
- Kendala yang dihadapi, seperti turunnya permintaan pasar, kesulitan bahan baku, gangguan produksi, atau masalah keuangan.

➡ Laporan tahap operasional ini sangat penting karena menunjukkan perkembangan nyata dari usaha dan membantu pemerintah melihat kontribusi usaha terhadap ekonomi daerah.



LKPM : Jadwal, Sanksi, dan Manfaat bagi Pelaku Usaha

A. PERIODE PELAPORAN LKPM

Dalam Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Nomor 5 Tahun 2025 pasal 286, setiap pelaku usaha wajib melaporkan LKPM sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Jadwalnya berbeda tergantung skala usaha:

1. Usaha Mikro dan Kecil (UMK)

Cukup melaporkan 2 kali dalam setahun (semesteran).

- Semester I: Januari – Juni → dilaporkan paling lambat 10 Juli.
- Semester II: Juli – Desember → dilaporkan paling lambat 10 Januari tahun berikutnya.

2. Usaha Menengah dan Besar

Wajib melaporkan setiap 3 bulan (triwulanan).

- Triwulan I: Januari – Maret → laporan paling lambat 10 April
- Triwulan II: April – Juni → laporan paling lambat 10 Juli
- Triwulan III: Juli – September → laporan paling lambat 10 Oktober
- Triwulan IV: Oktober – Desember → laporan paling lambat 10 Januari tahun berikutnya

Jadi, untuk UMK cukup dua kali saja. Perlu diingat jangan sampai lewat dari tanggal yang ditentukan.

B. SANKSI JIKA TIDAK LAPOR LKPM

Banyak pelaku usaha mengira kalau tidak melakukan LKPM tidak masalah. Padahal, ada konsekuensi nyata yang bisa merugikan usaha. Seperti yang telah disebutkan dalam Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Nomor 5 Tahun 2025. Pelaku usaha yang tidak menyampaikan LKPM selama 2 periode berturut-turut akan dikenakan pelanggaran ringan dan dikenai sanksi berupa peringatan tertulis pertama, kedua, dan/atau ketiga.

1. Peringatan tertulis pertama diberikan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari;
2. Peringatan tertulis kedua diberikan dalam jangka waktu 15 (lima belas) Hari; dan
3. Peringatan tertulis ketiga diberikan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari terhitung sejak tanggal terkirimnya surat peringatan melalui Sistem OSS dan dinotifikasi kepada Pelaku Usaha melalui surat elektronik.

Pelaku usaha wajib :

1. Memberikan tanggapan atas surat peringatan melalui Sistem OSS dan/atau
2. Melakukan pemenuhan kewajiban, tanggung jawab, dan/atau ketentuan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.

Bagi perusahaan yang tidak menyampaikan LKPM sesuai periode pelaporan, BKPM akan menindaklanjuti dengan mengirimkan surat peringatan kepada perusahaan. Perusahaan yang tidak merespon surat peringatan tersebut selama 3 (tiga) kali secara berturut-turut dapat dijatuhi sanksi berupa pembatalan/pencabutan izin perusahaan.

C. TIPS AGAR TIDAK TERLAMBAT LAPOR LKPM

1. Catat tanggal penting di kalender usaha atau HP Anda.
2. Laporkan di awal periode pelaporan.
3. Manfaatkan layanan pendampingan DPMPTSP. Jika bingung, datang saja ke kantor atau hubungi kontak resmi, sehingga laporan bisa selesai tanpa masalah.

D. MANFAAT LKPM BAGI PELAKU USAHA

1. Sarana Komunikasi Dua Arah. LKPM bukan hanya kewajiban lapor. Ini adalah kesempatan bagi Anda untuk berkomunikasi langsung dengan pemerintah. Melalui laporan ini, pemerintah pusat atau daerah dapat memantau kondisi nyata investasi Anda.
2. Ada Kolom Khusus untuk Masalah. LKPM menyediakan kolom khusus bernama “Permasalahan yang Dihadapi Perusahaan”. Kolom ini adalah tempat bagi Anda untuk menyampaikan kendala atau masalah yang Anda temui selama menjalankan usaha.
3. BKPM Akan Menindaklanjuti. Jangan ragu untuk mengisi kolom permasalahan. Jika Anda melaporkan sebuah kendala, BKPM akan menindaklanjuti dan memfasilitasi penyelesaiannya. Ini menunjukkan bahwa pemerintah peduli dan siap membantu Anda dalam mengatasi hambatan yang ada.



Panduan Praktis Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)

A. LANGKAH-LANGKAH PELAPORAN LKPM NON UMK

1. Laporan LKPM bisa diproses apabila sudah memiliki hak akses. Hal akses ini berupa username dan password yang dikirimkan ke alamat email yang dicantumkan saat pendaftaran. Apabila sudah ada hak akses maka bisa mengunjungi <https://oss.go.id/>. Klik “masuk” di pojok kanan atas”.



2. Kemudian masukkan “username” dan “password” lalu klik tombol “masuk”



Masuk

Nomor Ponsel, Email, Username, atau NIB

 Contoh: 081xxxxxxx atau nama@email.com

Kata Sandi

 Masukkan kata sandi 

[Butuh Bantuan?](#)

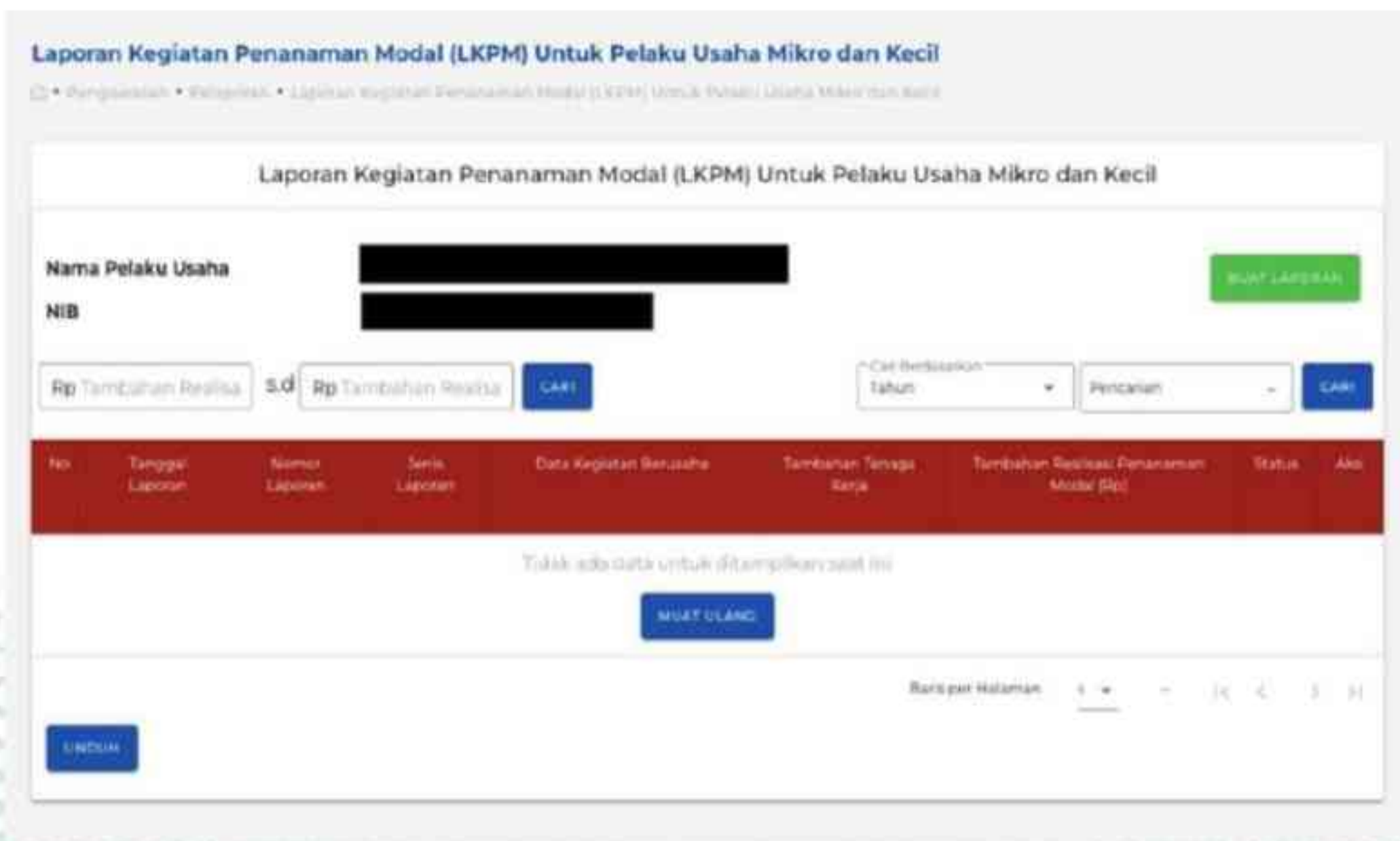
Masuk

Belum punya akun? [Daftar](#)

3. Setelah berhasil login maka pilih Menu “pelaporan” lalu lanjut dengan klik “laporan LKPM” kemudian dilanjutkan dengan “pelaporan”.



4. Klik “buat laporan” nanti akan menampilkan list LKPM yang telah dilaporkan pada periode sebelumnya



5. Kemudian pilih dan centang “data kegiatan usaha yang akan dilaporkan” kemudian klik “selanjutnya”

Rp Tambahan Resmi

sd

Rp Tambahan Resmi

CAR

Cari Berdasarkan

KBLU

Pencarian

CAR

Nama Pelaku Usaha

NIB

No

Data Kegiatan Berusaha

Rencana Penanaman Modal (Rp)

Total Realisasi (Rp)

Status Usaha/izin

Persyaratan Dasar dan UMKU

1

KONSTRUKSI Beton DapurKang

Perizinan Berusaha: 80021090000

No SS: (S274) Kota Semarang - Jawa Tengah (S222) Industri Perumahan, Industri/Manufaktur/Konstruksi

Nomor Kode Proyek: 20210-100-000-000-000

Proyek Inline: Tidak

Sumber Data: DSS 884

Modal Tetapi

Modal Kerja

Total Rencana

Modal Tetapi

Modal Kerja

Total Realisasi

Menengah Tinggi

Nilai terdapat Sertifikat Standar belum terakreditasi

Lihat Detail

2

KONSTRUKSI Beton DapurKang

Perizinan Berusaha: 80021090000

No SS: (S274) Kota Semarang - Jawa Tengah (S222) Industri Perumahan, Industri/Manufaktur/Konstruksi

Nomor Kode Proyek: 20210-100-000-000-000

Proyek Inline: Tidak

Sumber Data: DSS 884

Modal Tetapi

Modal Kerja

Total Rencana

Modal Tetapi

Modal Kerja

Total Realisasi

Menengah Tinggi

Nilai terdapat Sertifikat Standar belum terakreditasi

Lihat Detail

3

KONSTRUKSI Beton DapurKang

Perizinan Berusaha: 80021090000

No SS: (S274) Kota Semarang - Jawa Tengah (S222) Industri Perumahan, Industri/Manufaktur/Konstruksi

Nomor Kode Proyek: 20210-100-000-000-000

Proyek Inline: Tidak

Sumber Data: DSS 884

Modal Tetapi

Modal Kerja

Total Rencana

Modal Tetapi

Modal Kerja

Total Realisasi

Menengah Tinggi

Nilai terdapat Sertifikat Standar belum terakreditasi

Lihat Detail

Rangsang Halaman

1-3 dari 3

1

2

3

KEMBALI

SELANJUTNYA

6. Pilih “data kegiatan usaha” dan klik tautan yang ada

1

Data Perizinan Berusaha

Realisasi Perizinan

Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) Untuk Pelaku Usaha Kecil

Rp Tambahan Resmi

sd

Rp Tambahan Resmi

CAR

Cari Berdasarkan

KBLU

Pencarian

CAR

Nama Pelaku Usaha

NIB

No

Data Kegiatan Berusaha

Rencana Penanaman Modal (Rp)

Total Realisasi (Rp)

Status Izin Usaha/izin

Persyaratan Dasar dan UMKU

1

No SS: (S272) Kota Sukakarta - Jawa Tengah (S222) Pembinaan dan Air Tanah Di dalam

Nomor Kode Proyek: 20210-100-000-000-000

Proyek Inline: Tidak

Tingkat Risiko: Menengah Rendah

Modal Usaha

Modal Kerja

Total Rencana

Modal Usaha

Modal Kerja

Total Realisasi

Terdapat Otomatis

Lihat Detail

Rangsang Halaman

1-2 dari 2

1

2

KEMBALI

SELANJUTNYA

7. Periksa data usaha. Sistem menampilkan data usaha, rencana investasi, total realisasi sebelumnya, status izin, dan persyaratan dasar. Klik tautan untuk lihat detail bila perlu.

1 Data Kegiatan Berusaha

2 Realisasi Investasi

Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) Untuk Pelaku Usaha Kecil

Nama Pelaku Usaha: NIB :

Data Kegiatan Berusaha	Rencana Penanaman Modal (Rp)	Total Realisasi Sampai Periode Sebelumnya (Rp)	Status Usaha/SS/izin	Persyaratan Dasar dan UMKU
No SS: Nomor Kode Proyek: (3322) Jawa Tengah - Kota Surakarta (03422) Peningkatan Ikan Air Tawar Di Kolam Proyek Irigasi: Tidak Tingkat Risiko: Menengah Rendah	Modal Usaha: 40.000.000 Modal Kerja: 10.000.000 Total Rencana: 50.000.000	Modal Usaha: 300.000 Modal Kerja: 300.000 Total Realisasi: 1.000.000	Tertib Otomatis	Lihat Detail

8. Dilanjutkan dengan melengkapi data “realisasi penanaman modal” (apabila pelaku usaha belum pernah melaporkan LKPM maka silahkan isi kolom Total Realisasi Periode Sebelumnya. Bagi yang sudah pernah melaporkan, sistem akan secara otomatis menampilkan data “total realisasi periode sebelumnya” secara otomatis).

I. Realisasi Penanaman Modal (Sesuai Nilai Perolehan Awal)

A. Investasi

	Rencana Penanaman Modal	Total Realisasi Periode Sebelumnya	Realisasi Periode Pelaporan	Total Akumulasi Realisasi
1. Modal Tetap	Rp 5.000.000	Rp 0	Rp 0	Rp 0
2. Modal Kerja	Rp 1.000.000	Rp 0	Rp 0	Rp 0
Jumlah	Rp 6.000.000	Rp 0	Rp 0	Rp 0

B. Penjelasan Atas Realisasi Penanaman Modal

Setiap realisasi yang diisi akan otomatis dijumlahkan sistem ke dalam Total Akumulasi Realisasi. Jika tidak ada realisasi di periode tersebut, wajib diisi keterangan pada kolom penjelasan.

9. Kemudian lanjut melengkapi “data penggunaan tenaga kerja” (apabila pelaku usaha belum pernah melaporkan LKPM maka silahkan isi kolom Tenaga Kerja Sebelum Periode Pelaporan. Bagi yang sudah pernah melaporkan, sistem akan secara otomatis menampilkan data “tenaga kerja sebelum periode pelaporan” secara otomatis).

II. Penggunaan Tenaga Kerja

Indonesia

	Rencana Tenaga Kerja	Total Tenaga Kerja Sebelum Periode Pelaporan	Tambahan tenaga kerja periode pelaporan	Pengurangan tenaga kerja periode pelaporan	Total tenaga kerja sampai dengan periode pelaporan
Laki-laki	0 Orang	0 Orang	0 Orang	0 Orang	0 Orang
Perempuan	0 Orang	0 Orang	0 Orang	0 Orang	0 Orang
Jumlah Tenaga Kerja	0 Orang	0 Orang	0 Orang	0 Orang	0 Orang

10. Untuk bagian Produksi dan Pemasaran, pengisian dilakukan satu kali setahun di Semester 2. Isi data sesuai kondisi usaha Anda, yaitu jumlah produksi barang/jasa. Jika ada ekspor, tambahkan juga persentase dan nilainya dalam dolar. Kalau usaha Anda belum produksi (0), maka bagian ekspor tidak bisa diisi.

III. Produksi Barang / Jasa dan Pemasaran Per Tahun

No	Jenis Barang/Jasa	Satuan	Kapasitas	Realisasi Produksi	Ekspor (%)
1	produk 02	Rp	12		0,00 Tidak Ada %

Nilai Ekspor dalam US \$ Per Tahun

11. Lanjutkan dengan melengkapi “data permasalahan yang dihadapi pelaku usaha” Jika ada, isi Data Permasalahan Usaha dengan memilih kategori, detail (jika muncul), dan keterangan masalah. Klik Simpan untuk menyimpan, atau centang data yang salah lalu klik Hapus. Anda bisa menambahkan lebih dari satu permasalahan.

IV. Permasalahan yang Dihadapi Pelaku Usaha ⓘ

Kategori Permasalahan :

Pilih kategori Permasalahan

Masalah Lainnya

Detail Permasalahan :

Pilih Detail permasalahan

Dan lain lain

Keterangan masalah (Kronologi)

SIMPAN PERMASALAHAN

silakan tekan tombol untuk menyimpan/menambah permasalahan

No	Kategori permasalahan	Detail permasalahan	Keterangan Permasalahan (Kronologi)
☒	1	Tenaga Kerja	Kekurangan

HAPUS

12. Isi data penanggung jawab LKPM dengan nama, nomor HP, jabatan, dan email. Kemudian lanjut menyetujui pernyataan pelaporan LKPM dengan centang “disclaimer” dan klik “kirim laporan”

Petugas Penanggung Jawab LKPM dari Pelaku Usaha ⓘ

Nama Petugas

Jabatan

No. Telp/HP Petugas

Contoh: 081234567890

Email

Untuk kemudahan verifikasi silakan sertakan nomor telepon hp

☒ Disclaimer

Dengan ini saya menyatakan bahwa data dan informasi yang saya isi adalah benar serta saya bertanggung jawab penuh atas data dan informasi tersebut.

KEMBALI

SIMPAN SEBAGAI DRAFT

PBATIKAN

KIRIM LAPORAN

13. Setelah data lengkap akan muncul tampilan “pemberitahuan laporan diterima” kemudian selanjutnya LKPM akan melalui proses verifikasi untuk menyetujui atau menolak permohonan pelaporan LKPM yang diajukan

Pemberitahuan

X

Laporan Anda telah kami terima.
Terima kasih telah menyampaikan laporan.

KEMBALI KE HALAMAN MUKA

BUAT LAPORAN BARU

13

14. Setelah penyampaian LKPM sudah selesai maka selanjutnya LKPM akan melakukan proses verifikasi dan evaluasi terkait kesesuaian laporan sehingga pelaku usaha wajib untuk terus memantau status LKPM. Apabila ada permintaan perbaikan LKPM pelaku usaha dapat langsung memberikan tanggapan dan menyampaikan kembali.

Catatan

No	Tanggal Verifikasi	Catatan Verifikator	Tanggal Pelaku Usaha	Tanggapan Pelaku Usaha
☒	1	24-2-2022 11:54:00	Gunakan Email yang benar. Terima kasih.	

Halaman Berisi 11 1 dari 1

Tanggapan Anda

Sudah diperbaiki harap periksa kembali. Terima kasih.

KIRIM TANGGAPAN

15. Jika laporan LKPM UMK sudah disetujui verifikator, statusnya akan menjadi “Disetujui”. Anda bisa melihat tanda terima, cetak laporan, atau mengunduhnya. Status Disetujui menandakan laporan sudah resmi terkirim sesuai periode.

Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) Untuk Pelaku Usaha Mikro dan Kecil

Nama Pelaku Usaha

NIB

Rp Tambahan Modal

SLD

Rp Tambahan Modal

CASH

Donor Berdiversi

Status

Pencarian

CASH

No	Tanggal Laporan	Nomor Laporan	Jenis Laporan	Data Kegiatan Berusaha	Tambahan Tenaga Kerja	Tambahan Realisasi Penanaman Modal (Rp)	Status	Aksi
1	24-2-2022 11:54:00	LK00050	Semester II 2021	Perizinan Berusaha: 126300010001 No Izin: 1263000100010001 Nomor Kode Proyek: 00201-0010-0000-0000-0000 (001) 0000-0000-0000-0000 - Diklaimkan (0000) Penanaman Modal Bahan Berharga Dan Beras (00) Proyek Inti: Tidak Tingkat Risiko: Tinggi	Teknisi	Modal Tetap: 1000000 Modal Kerja: 200000 Total Realisasi: 1200000	Disetujui	TANDA TERIMA CETAK LKPM UNDUH
2	25-2-2022 00:00:00	LK00052	Semester II 2021	Perizinan Berusaha: 090000010001 No Izin: 0900000100010001 Nomor Kode Proyek: 00201-0000-0000-0000-0000 (0000) 0000-0000-0000-0000 - Diklaimkan (0000) Penanaman Modal Bahan Berharga Dan Beras (00) Proyek Inti: Tidak Tingkat Risiko: Tinggi	Teknisi	Modal Tetap: 500000 Modal Kerja: 300000 Total Realisasi: 800000	Disetujui	TANDA TERIMA CETAK LKPM UNDUH

Menampilkan Halaman 11 1 dari 1

UNDUH

B. LANGKAH-LANGKAH PELAPORAN LKPM NON UMK TAHAP KONSTRUKSI

1. Kunjungi <https://oss.go.id/>. Klik “masuk” di pojok kanan atas”.



2. Kemudian masukkan “username” dan “password” lalu klik tombol “masuk”



Masuk

Nomor Ponsel, Email, Username, atau NIB

Contoh: 081xxxxxxx atau nama@email.com

Kata Sandi

Masukkan kata sandi

[Butuh Bantuan?](#)

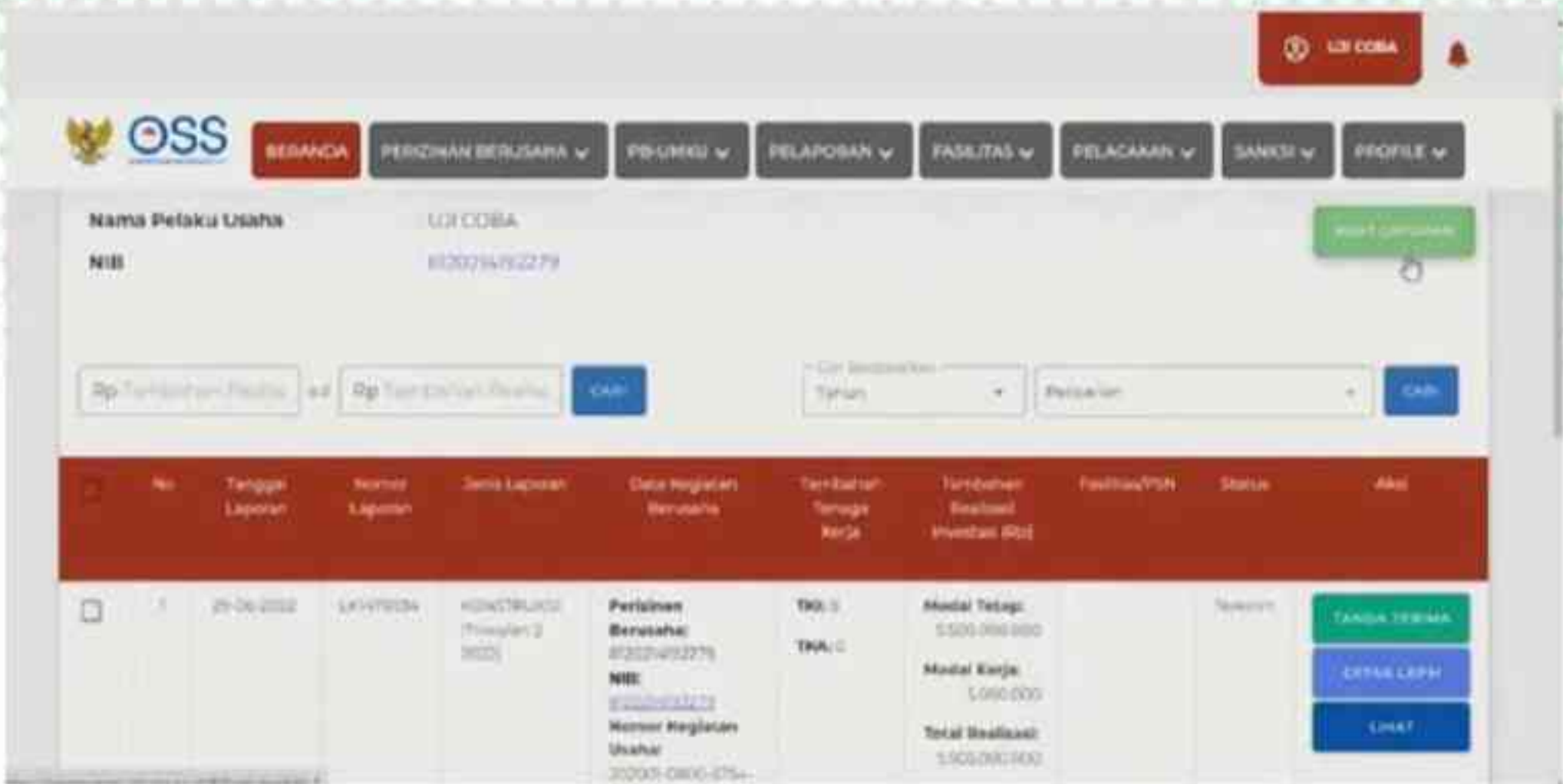
Masuk

Belum punya akun? [Daftar](#)

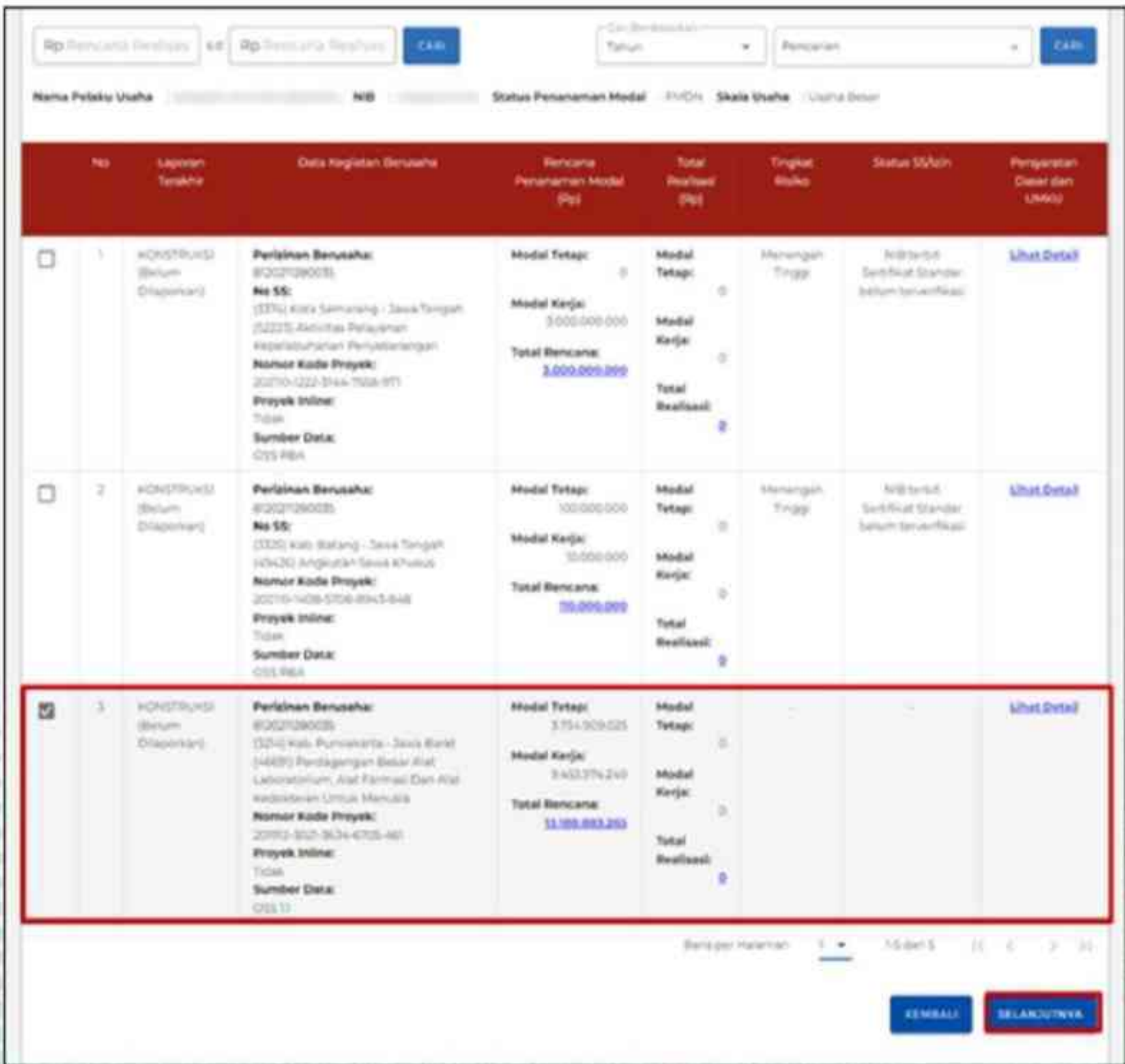
3. Masuk ke Menu Pelaporan: Akses menu "pelaporan," lalu "laporan LKPM," dan klik "pelaporan".



4. Buat Laporan Baru: Setelah masuk ke halaman LKPM, klik tombol "buat laporan".



5. Pilih Kegiatan Usaha: Pilih kegiatan usaha yang akan Anda laporkan dari daftar yang tersedia. Pilih Tahap Konstruksi



6. Setelah memilih kegiatan, klik "selanjutnya". Saat muncul pesan pop-up, pilih "tidak" untuk menyatakan laporan ini berada pada tahap konstruksi.

Pemberitahuan

X

Apakah kegiatan usaha (proyek) ini siap operasional dan atau komersial?

YA

TIDAK

7. Isi Data Realisasi dari modal tetap dan modal kerja

Realisasi Penanaman Modal [Sesuai Nilai Perolehan Awal]

Modal Tetap

	Bencana Penanaman Modal	Tambahan Realisasi	Total Akumulasi Realisasi
	(Rp)	(termasuk realisasi periode sebelumnya yang belum dilaporkan)	(Rp)
Pembelian dan pematangan tanah	Rp 0	Rp 0	Rp 0
Bangunan / gedung	Rp 2.252.672.700	Rp 0	Rp 0
Mesin/Peralatan & suku cadang	Rp 0	Rp KTR, untuk 10	Rp 0
Lain-lain	Rp 28.225.540	Rp	Rp 0
Sub Jumlah	Rp 2.320.898.240	Rp 0	Rp 0

Modal Kerja

	Bencana Penanaman Modal	Tambahan Realisasi	Total Akumulasi Realisasi
	(Rp)	(Rp)	(Rp)
Modal Kerja	Rp 2.322.075.600	Rp 0	Rp 0
Jumlah	Rp 4.642.973.840	Rp 1.000.000.000	Rp 1.000.000.000

- Rencana Penanaman Modal Tetap: 3.000 tr

- Perkiraan Potensi Sumbangan Modal Tetap: 100.000 tr

- Perkiraan Potensi: 100.000 tr

PERUBAHAN DATA NILAI TOTAL AKUMULASI (APARILA DIPERLUKAN)

* Angka bisa dipukul 1 (satu) kali

17

8. Lengkapi Perubahan Data Nilai Total Akumulasi (Apabila Diperlukan)

Perubahan Data Nilai Total Akumulasi

Total Akumulasi Realisasi Penanaman Modal
Samudra

Total Akumulasi Realisasi Penanaman Modal
Meninggi

Modal Tetap

Pembelian dan pemasangan tanah

Rp

0

Rp

0

Bangunan / gedung

Rp

1.000.000.000

Rp

2.000.000.000

Meubel furniture & suku cadang

Rp

1.000.000

Rp

2.000.000

Lain-lain

Rp

5.000.000

Rp

20.000.000

Sub Jumlah

Rp

1.001.000.000

Rp

2.002.000.000

Modal Kerja

Modal kerja

Rp

0

Rp

0

Jumlah

Rp

1.001.000.000

Rp

2.002.000.000

SUBIT PERSYARAH

9. Isikan data tenaga kerja di kolom yang ada; total tambahan dan pengurangan akan dihitung secara otomatis.

Realisasi Tenaga Kerja termasuk tenaga kerja kontrak (tidak termasuk Komisaris dan Direksi)

Rencana Tenaga Kerja

Total Tenaga Kerja
Sebelum Periode
Pelaporan

Tambahan tenaga kerja
periode pelaporan

Pengurangan tenaga kerja
periode pelaporan

Total tenaga kerja sampai
periode pelaporan

Indonesia

Laki-laki

10

Orang

0

Orang

0

Orang

0

Orang

0

Orang

Pemampuan

10

Orang

0

Orang

0

Orang

0

Orang

0

Orang

Jumlah Tenaga Kerja Indonesia

20

Orang

0

Orang

0

Orang

0

Orang

0

Orang

Tenaga Kerja Lokal Setempat

Tenaga kerja lokal setempat

0

Orang

0

Orang

Asing

Asing

0

Orang

0

Orang

0

Orang

0

Orang

0

Orang

Jumlah Keseluruhan

20

Orang

0

Orang

0

Orang

0

Orang

0

Orang

10. Laporkan Permasalahan: Jelaskan permasalahan yang dihadapi. Jika tidak ada, pilih "tidak ada masalah". Anda bisa memilih lebih dari satu kategori permasalahan.

IV. Permasalahan yang Dihadapi Pelaku Usaha ⓘ

Kategori Permasalahan :

Pilih kategori permasalahan

Masalah Lainnya

Detail Permasalahan :

Pilih detail permasalahan

Dan lain-lain

Keterangan Masalah (Opsional)

SIMPAN PERMASALAHAN

Anda akan tekan tombol untuk menyimpan dan menambah permasalahan.

No	Tanggal Melaporkan	Kategori Permasalahan	Detail Permasalahan	Keterangan Permasalahan (Opsional)
Tidak ada data untuk ditampilkan, silakan tambah permasalahan.				

Simpan

11. Isi Data Penanggung Jawab: Lengkapi nama, nomor HP, jabatan, dan email dari petugas yang mengisi laporan.

Petugas Penanggung Jawab LKPM dari Pelaku Usaha ⓘ

Nama Petugas

Jabatan

No. Telp/HP Petugas

0856-12345678

Email

+

Anda bertanggung jawab atas kebenaran informasi yang diisi.

☒ Disclaimer

Dengan ini saya menyatakan bahwa data dan informasi yang saya isi adalah benar serta saya bertanggung jawab penuh atas data dan informasi tersebut.

KEMBALI

SIMPAN SEBAGAI DRAFT

PRINTING

SIMPAN LAPORAN

12. Jika Anda memiliki status Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), akan muncul notifikasi untuk *Laporan Outward Investment* (OI). Anda bisa mengabaikannya atau melanjutkan ke laporan OI; bagaimanapun, laporan LKPM Anda akan tetap terkirim.

Pemberitahuan

Apakah Anda memiliki kegiatan usaha di luar wilayah Indonesia (Outward Investment)?

YA

TIDAK

14. Setelah penyampaian LKPM sudah selesai maka selanjutnya LKPM akan melakukan proses verifikasi dan evaluasi terkait kesesuaian laporan sehingga pelaku usaha wajib untuk terus memantau status LKPM. Apabila ada permintaan perbaikan LKPM pelaku usaha dapat langsung memberikan tanggapan dan menyampaikan kembali.

Catatan

No	Tanggal Verifikasi	Catatan Verifikator	Tanggal Pelaku Usaha	Tanggapan Pelaku Usaha
☒	1	24-2-2022 11:54:00	Gunakan Email yang benar. Terima kasih.	

Halaman Baru

TAMAT

Tanggapan Anda

Sudah diperbaiki harap periksa kembali. Terima kasih.

KIRIM TANGGAPAN

15. Jika laporan LKPM UMK sudah disetujui verifikator, statusnya akan menjadi “Disetujui”. Anda bisa melihat tanda terima, cetak laporan, atau mengunduhnya. Status Disetujui menandakan laporan sudah resmi terkirim sesuai periode.

Nama Pelaku Usaha

NIB

BUAT LAPORAN

Sip. Tambahan Dasar

Sip. Tambahan Besok

CARI

Dim. Berapa

Tahun

Rendahan

CARI

No	Tanggal Laporan	Nomor Laporan	Jenis Laporan	Data Registrasi Berusaha	Tambahan Tenaga Kerja	Tambahan Beasbas Investasi (Rp)	Facilitas/PSN	Status	Aksi
☐	1	01-02-2022 09:33:17	LKPM4786	WONP/RUMAH (Pribadi & 2021)	Peralatan Berusaha: 970021280005 Nomor Kode Proyek: 207102-0020-3629-6705-407 (2024) Kab. Puncakerta - Jawa Barat (64085) Perdagangan Besar Alat Laboratorium Alat Farmasi Dan Alat Kedokteran Untuk Manusia Proyek Indihar: 1000 Tingkat Risiko: Sumber Data: (2021.1)	TKS 1 TKS 2	Modal Tetap: 2022000000 Modal Kerja: 0 Total Beasbas: 2022000000	Disetujui	TANDA TERIMA CETAK LKPM UNDUH

Baris per Halaman

15 dari 25

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

UNDUH

C. LANGKAH-LANGKAH PELAPORAN LKPM NON UMK TAHAP PRODUKSI

1. Secara umum, langkah-langkah pelaporan LKPM tahap produksi dan tahap konstruksi memiliki proses yang sama. Perbedaannya terletak pada detail pengisian realisasi penanaman modal, di mana laporan tahap produksi tidak sedetail saat tahap konstruksi.

I. Realisasi Penanaman Modal (Sesuai Nilai Perolehan Awal)

A. Investasi

	Rencana Penanaman Modal	Total Realisasi Periode Sebelumnya	Realisasi Periode Pelaporan	Total Akumulasi Realisasi
1. Modal Tetap	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0
2. Modal Kerja	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0
Jumlah	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0

B. Penjelasan Atas Realisasi Penanaman Modal

2. Pengisian realisasi produksi barang/jasa dan pemasaran per tahun hanya diisi satu kali per tahun, yaitu pada Triwulan IV.

Produksi Barang / Jasa dan Pemasaran per Tahun

No	Jenis Barang/Jasa	Satuan	Kapasitas	Realisasi Produksi	Ekspor (%)
1	Pipa Aluminium	Kg	100	0	0
2	Lembaran Tembaga	Ton	200	0	0

Nilai Ekspor dalam US \$ Per Tahun0.00

Pada kolom nilai ekspor dalam US\$ hanya dapat diisi apabila pelaku usaha mengisi kolom ekspor

3. Pengisian Data Kewajiban Perusahaan
- Kewajiban Divestasi: Anda harus melaporkan apakah divestasi dipersyaratkan dan sudah dilaksanakan. Jika sudah, unggah dokumen yang relevan (akta perubahan kepemilikan saham atau surat pernyataan).

Kewajiban Perusahaan ⓘ

1. Kewajiban Divestasi ⓘ

Apakah Diperkirakan?

Diperkirakan

Apakah sudah dilaksanakan?

Ya

☒ Akta Perubahan Kepemilikan Saham Terakhir

☐ Pernyataan Kesepakatan

 Pilih File

Maksimal Upload File: 5MB

Mohon unggah Akta perubahan kepemilikan saham pelaksanaan divestasi

- BPJS Ketenagakerjaan: Anda wajib menginformasikan apakah perusahaan Anda memiliki BPJS dan mengisi nomor pendaftaran perusahaan.

2. BPJS Ketenagakerjaan ⓘ

Apakah Anda Memiliki?

Ya

Nomor Pendaftaran Perusahaan

ABC123456789

- Kemitraan dengan UKM: Laporkan apakah kemitraan dipersyaratkan. Jika ya, Anda harus mengisi pola kemitraan dan nama pelaku usaha yang menjadi mitra.

3. Kemitraan dengan UKM ⓘ

Apakah dipersyaratkan :

Pilih Jenis Sisa
Dipersyaratkan

Pola Kemitraan :

Pilih sub kategori
Subkontrak

Nama Pelaku Usaha

Nama Pelaku Usaha / Perusahaan UKM yang Bermitra

SIMPAN DATA KEMITRAAN DENGAN UKM

No	Pola Kemitraan	Nama Pelaku Usaha / Perusahaan UKM yang Bermitra
☐	1	Indo Plasma

➕ TAMBAH

- Pelatihan Tenaga Kerja Indonesia: Laporkan data pelatihan yang diberikan kepada TKI, termasuk jenis, pelaksanaan, dan jumlah tenaga kerja yang dilatih.

4. Pelatihan Tenaga Kerja Indonesia

Jenis Pelatihan:

Pelaksanaan:

Jumlah Tenaga Kerja yang Dilatih: Orang

SIMPAN DATA PELATIHAN TENAGA KERJA

No	Jenis Pelatihan	Pelaksanaan	Jumlah TKI yang dilatih
Tidak ada data untuk ditampilkan saat ini			

- Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR): Anda wajib melaporkan apakah program CSR sudah dilaksanakan, program apa saja yang dilakukan, alokasi biayanya, serta output dan outcome dari program tersebut.

5. Tanggung jawab sosial perusahaan (CSR)

Apakah sudah dilaksanakan?:

Program CSR yang sudah dilakukan selama periode pelaporan:

Alokasi Biaya CSR:

Output dan Outcome:

- Kewajiban Pengelolaan Lingkungan: Laporkan informasi terkait sarana pengelolaan lingkungan, seperti Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL), apakah masih berfungsi, dan upaya perbaikan jika tidak.

Catatan

No	Tanggal Verifikasi	Catatan Verifikator	Tanggal Pelaku Usaha	Tanggapan Pelaku Usaha
☒	1	31-3-2022 11:56:00	Cek email yang berisi Terima kasih	

Halaman Baris: 10 / Total: 1

Tanggapan Anda:
Sudah diperbaiki harap periksa kembali. Terima kasih

KIRIM TANGGAPAN

6. Jika laporan LKPM UMK sudah disetujui verifikator, statusnya akan menjadi “Disetujui”. Anda bisa melihat tanda terima, cetak laporan, atau mengunduhnya. Status Disetujui menandakan laporan sudah resmi terkirim sesuai periode.

Nama Pelaku Usaha

NIB

UAT LAPORAN

Rp Tambahan Profil

Rp Tambahan Biaya

CARI

Cari Berdasarkan:

Tahun

Periode

CARI

☐	No	Tanggal Laporan	Nomor Laporan	Jenis Laporan	Data Kegiatan Berusaha	Tambahan Tenaga Kerja	Tambahan Realisasi Investasi (Rp)	Facility/PSN	Status	Aksi
☐	1	01-05-2022 09:33:17	LK12475%	KDAGTBUKSI (Tindakan K 2021)	Perizinan Berusaha: 812021280033 Nomer Kode Proyek: 201913-8025-5434-4705-441 (S214) Kals Pulaukarta - Ssang Bant (J440P) Perdagangan : Besar Alat Laboratorium Alat Farmasi Dan Alat Industri Dan Sinar Melaya Proyek Inisiatif: Tidak Tingkat Risiko: 1 Sumber Data: QOS 11	TKK 1 TKK 1	Modal Tetap: 2322.000.000 Modal Kerja: 0 Total Realisasi: 2322.000.000		Disetujui	TANDA TERIMA CETAK LKPM UNDUH

Baris/der Halaman: 10 / 1-5 dari 22

UNDUH

D. KENDALA DAN SOLUSI DALAM LKPM

1. Salah Memasukkan Jenis Modal (Modal Tetap vs Modal Kerja)

☛ Banyak pelaku usaha sering bingung membedakan mana yang termasuk Modal Tetap dan mana yang Modal Kerja.

Kesalahan yang sering terjadi :

Misalnya, pembelian mesin atau kendaraan dicatat sebagai modal kerja, padahal itu seharusnya masuk ke modal tetap. Begitu juga sebaliknya, ada yang mencatat biaya gaji karyawan ke modal tetap, padahal itu adalah modal kerja.

Kenapa ini jadi masalah?

Kalau salah mencatat, laporan investasi jadi tidak akurat. Pemerintah sulit membaca perkembangan usaha, dan pelaku usaha sendiri jadi tidak bisa melihat gambaran nyata perkembangan usahanya. Berikut ini adalah tabel yang mengelompokkan berbagai jenis pengeluaran yang terbagi menjadi Modal Tetap dan Modal Kerja.

Tabel 1. Klasifikasi Jenis Pengeluaran Penanaman Modal

Jenis Pengeluaran	Kategori	Keterangan
Beli tanah untuk homestay/pertanian	Modal Tetap	Aset jangka panjang.
Membangun gedung/warung/workshop	Modal Tetap	Aset fisik yang tidak habis pakai.
Membeli mesin kopi/mesin jahit	Modal Tetap	Peralatan utama untuk produksi.
Membeli laptop & printer untuk kasir	Modal Tetap	Peralatan penunjang jangka panjang.
Membeli kendaraan operasional (motor/mobil)	Modal Tetap	Aset untuk mobilitas bisnis.
Membeli biji kopi, kain, atau bahan baku lain	Modal Kerja	Habis dalam satu siklus produksi.
Membayar gaji karyawan bulanan	Modal Kerja	Biaya operasional rutin.

Jenis Pengeluaran	Kategori	Keterangan
Membayar tagihan listrik, internet, PDAM	Modal Kerja	Biaya operasional bulanan.
Biaya cetak brosur atau iklan online	Modal Kerja	Biaya pemasaran.
Pembelian ATK (kertas, pulpen, tinta)	Modal Kerja	Barang habis pakai.

Solusinya:

Ingat prinsip sederhana:

- Modal Tetap = pengeluaran jangka panjang, digunakan berulang, tidak habis dalam 1 periode. Contoh: tanah, gedung, mesin, kendaraan, peralatan kantor.
- Modal Kerja = pengeluaran rutin atau jangka pendek yang habis dalam 1 periode. Contoh: gaji karyawan, listrik, air, bahan baku, biaya promosi.

Jadi, sebelum mengisi LKPM, catat dulu setiap pengeluaran Anda, lalu tandai apakah itu dipakai jangka panjang (tetap) atau sekali habis (kerja).

Catatan Penting:

- LKPM bukan laporan akumulasi, tapi laporan realisasi per periode.
- Jika tidak ada kegiatan, wajib tetap lapor dengan mengisi angka 0 (nihil).
- Bedakan jelas antara Modal Tetap (aset jangka panjang) dan Modal Kerja (biaya operasional).

2. Laporan “Bisu” (Mengisi Angka Tanpa Keterangan)

Ada pelaku usaha yang hanya mengisi angka nominal saja tanpa menuliskan keterangan detailnya.

Kesalahan yang sering terjadi :

Misalnya, menulis “Modal Tetap: Rp 200.000.000” tanpa menjelaskan uang itu dipakai untuk apa.

Kenapa ini jadi masalah ?

Pemerintah jadi sulit memverifikasi, apakah modal tersebut dipakai untuk beli mesin, menmabah bangunan, atau beli kendaraan. Dari sisi usaha, laporan seperti ini juga terlihat tidak detai, terkesan penngelolaan kegiatan usahanya tidak bagus

Solusinya:

Gunakan kolom keterangan sebaik-baiknya. Tuliskan detail singkat. Dengan begitu, laporan Anda jadi lebih jelas, rapi, dan mudah dipahami. Berikut ini adalah contoh perbandingan antara laporan LKPM yang kurang informatif (disebut 'Laporan Bisu') dan laporan yang informatif, yang memberikan data lebih rinci dan berguna.

Tabel 2. Perbandingan Laporan LKPM: 'Laporan Bisu' vs. 'Laporan Informatif'

Jenis	Contoh Buruk (Laporan Bisu)	Contoh Baik (Laporan Informatif)
Realisasi Modal Tetap	Rp 250.000.000	Rp 250.000.000
Keterangan	- (dibiarkan kosong)	Pembangunan gudang bahan baku (Rp 200jt) + Pembelian 1 unit mobil pick-up operasional (Rp 50jt)
Realisasi Modal Kerja	Rp 85.000.000	Rp 85.000.000
Keterangan	Biaya operasional (terlalu umum)	Gaji 5 karyawan (Rp 25jt) + Pembelian bahan baku kopi & gula (Rp 50jt) + Biaya marketing (Rp 10jt)

3. Copy-Paste Angka dari Periode Sebelumnya

➡ Banyak pelaku usaha hanya menyalin angka laporan dari periode sebelumnya tanpa memperbarui dengan data yang baru.

Berikut ini adalah contoh kesalahan yang terjadi saat mengisi laporan LKPM, yaitu copy-paste data dari triwulan sebelumnya, yang menyebabkan laporan menjadi tidak akurat.

Tabel 3. Contoh Kesalahan dalam Pelaporan LKPM: Kasus Copy-Paste Data

Periode	Belanja Sebenarnya	Laporan yang salah	Laporan yang seharusnya	Keterangan
Triwulan I	Rp 50 juta	Rp 50 juta	Rp 50 juta	Benar, karena memang memang belanja Rp 50 juta di periode ini.
Triwulan II	Rp 20 juta	Rp 50 juta (copy-paste)	Rp 20 juta	Salah, seharusnya ditulis Rp 20 juta saja sesuai belanja tambahan.
Triwulan III	Nihil (Rp 0)	Rp 50 juta (copy-paste)	Rp 0	Salah, jika tidak ada belanja cukup isi Nihil (0).

Kenapa ini jadi masalah?

Laporan jadi tidak sesuai kenyataan. Padahal, pemerintah ingin tahu perkembangan usaha tiap periode. Kalau datanya salah, hasil analisisnya juga bisa keliru.

Solusinya:

Ingat bahwa LKPM itu laporan per periode. Jadi, angka yang dimasukkan harus sesuai dengan kegiatan hanya di periode tersebut. Kalau ada belanja baru, masukkan. Kalau tidak ada, laporkan Nihil (0). Jangan copy-paste angka lama.

4. Melaporkan Semua KBLI Secara Ganda di Satu Lokasi

Ada usaha yang punya lebih dari satu KBLI (misalnya café + penginapan), tapi semua dijalankan di satu tempat dengan aset yang sama.

Kesalahan yang sering terjadi:

Semua KBLI dilaporkan dengan angka yang sama. Akibatnya, realisasi terlihat berlipat-lipat.

Berikut ini adalah contoh kesalahan yang terjadi pada pelaku usaha yang memiliki lebih dari satu jenis bisnis di satu lokasi, yaitu pelaporan ganda untuk satu investasi yang sama.

Tabel 4. Contoh Kasus: Pelaporan Ganda Investasi pada Usaha di Lokasi yang Sama

KBLI (Jenis Usaha)	Lokasi Usaha	Belanja Nyata	Laporan yang salah	Laporan yang benar
Café (56101)	Jl. Magelang No. 1	Rp 100 juta	Rp 100 juta	Rp 100 juta (KBLI utama)
Penginapan (55101)	Jl. Magelang No. 1	Sama (pakai aset café)	Rp 100 juta (dobel)	Rp 0 (karena asetnya sama)

Kenapa ini jadi masalah?

Terjadi duplikasi data, seolah-olah ada investasi besar padahal kenyataannya sama.

Solusinya:

- Pilih KBLI Utama: Tentukan jenis usaha mana yang paling utama. Misalnya, jika Anda punya kafe dan juga penginapan di satu tempat, dan modal utama Anda ada di kafe, maka kafe adalah KBLI utama.
- Laporkan Investasi di KBLI Utama: Masukkan seluruh nilai investasi (misalnya, biaya pembangunan gedung dan pembelian mesin) hanya di laporan KBLI utama.
- Laporkan Nol (0) di KBLI Lainnya: Untuk laporan KBLI yang lain, Anda tetap harus melaporkannya. Namun, pada kolom realisasi investasi, cukup isi dengan angka Rp 0 (nol).
- Berikan Keterangan: Agar petugas tidak bingung, tuliskan di kolom keterangan: "Investasi sudah dilaporkan di KBLI [nomor KBLI utama] karena menggunakan aset yang sama."

5. Tidak Lapor Kalau Nihil (Tidak Ada Kegiatan)

☛ Banyak yang berpikir, kalau tidak ada kegiatan usaha atau pengeluaran, tidak perlu melapor.

Kesalahan yang sering terjadi:

Membiarkan laporan kosong tanpa mengisi apapun.

Kenapa ini jadi masalah?

Sistem OSS tetap menganggap Anda tidak melapor, Meskipun Anda tidak ada kegiatan atau pengeluaran modal di triwulan tersebut, Anda tetap wajib melaporkan LKPM. Laporan ini bukan hanya tentang uang, tetapi juga tentang status usaha.

Kalau laporan dibiarkan kosong, pemerintah bisa mengira usaha sudah tidak aktif atau bahkan sudah tutup. Ini bisa berakibat fatal, karena izin usaha bisa dicabut atau dibekukan. Laporan yang kosong tidak memberikan informasi apa-apa.

Berikut ini adalah contoh perbandingan antara laporan yang dibiarkan kosong dengan laporan yang benar (diisi 'Nihil') ketika tidak ada pengeluaran di triwulan berjalan.

Tabel 5. Contoh Pelaporan LKPM saat nihil

Status Kegiatan	Laporan yang salah	Laporan yang benar	Keterangan
Triwulan ini tidak ada kegiatan atau pengeluaran modal.	Tidak Melaporkan Sama Sekali (Laporan dibiarkan kosong)	Melaporkan dengan mengisi 'Nihil' atau 'Rp 0'	Kewajiban lapor tetap ada. Melaporkan 'Nihil' menunjukkan usaha Anda masih aktif, meskipun tidak ada investasi baru.

Cara Melaporkan yang Benar

Cara yang benar adalah dengan tetap melapor, tapi diisi 'Nihil' atau 'Rp 0' di kolom realisasi belanja.

Dengan melaporkan 'Nihil', Anda memberitahu pemerintah bahwa:

- Usaha Anda masih aktif: Anda hanya sedang tidak ada pengeluaran di periode itu.
- Laporan Anda akurat: Anda melaporkan data yang sebenarnya.
- Anda memenuhi kewajiban: Anda disiplin dalam memenuhi kewajiban pelaporan, yang menunjukkan komitmen Anda sebagai pelaku usaha yang taat aturan.

6. Pelaku Usaha mengisi nilai realisasi penanaman modal sama dengan nilai rencana investasi pada izin di OSS

Pelaku usaha masih bingung antara rencana investasi dengan realisasi investasi.

- Rencana investasi adalah jumlah modal yang ditulis saat membuat izin usaha di OSS.
- Realisasi investasi adalah jumlah uang yang benar-benar sudah dipakai untuk usaha, misalnya untuk beli tanah, bangun gedung, beli mesin, atau modal kerja.

👉 Saat mengisi LKPM, yang ditulis adalah realisasi investasi, bukan rencana investasi. Jadi nilainya bisa lebih kecil dari rencana, sesuai dengan uang yang benar-benar sudah dikeluarkan. Berikut ini adalah contoh yang menjelaskan perbedaan antara rencana investasi yang Anda masukkan di OSS dengan realisasi investasi yang sebenarnya dilaporkan di LKPM setiap triwulan.

Tabel 6. Panduan Pemahaman: Rencana Investasi vs Realisasi Investasi

Aspek	Rencana Investasi (OSS)	Realisasi Investasi (LKPM)
Definisi	Jumlah modal yang direncanakan saat bikin izin usaha di OSS.	Jumlah uang yang benar-benar sudah dikeluarkan untuk usaha.
Waktu pengisian	Sekali saat bikin izin usaha atau revisi data di OSS.	Dilaporkan rutin setiap triwulan/semester sesuai jadwal LKPM.
Sifat Data	Masih rencana, target ke depan, belum tentu dipakai semua sekaligus.	Fakta nyata, sesuai pengeluaran yang benar-benar terjadi.
Contoh Angka	Rencana Rp 5 miliar (untuk tanah, bangunan, mesin, modal kerja).	Triwulan I: Rp 500 juta (beli tanah). Triwulan II: Rp 1 miliar (bangun gedung).
Yang Harus Diisi	Tidak dipakai untuk laporan rutin.	Isi hanya realisasi periode tersebut. Kalau tidak ada, tulis "0".
Kesalahan Umum	Banyak yang mengira LKPM harus diisi pakai angka rencana OSS.	Padahal yang benar: LKPM hanya diisi realisasi tiap periode, sesuai uang yang sudah keluar.



Tanya Jawab LKPM



dan



Kalau usaha saya masih tahap persiapan atau konstruksi, apakah tetap harus lapor?

Ya, tetap wajib. LKPM tidak hanya untuk usaha yang sudah produksi. Kalau masih tahap pembangunan, pembelian peralatan, atau menunggu izin teknis, tetap laporkan. Cukup tulis kondisi sebenarnya, misalnya “masih tahap konstruksi” atau “belum ada produksi”.

Kalau usaha saya belum ada kegiatan atau pendapatan, apa tetap harus lapor?

Ya, tetap wajib. Jangan dibiarkan kosong. Kalau memang belum ada kegiatan, cukup isi keterangan “belum ada kegiatan usaha” atau isi Rp 0 (Nihil) di kolom belanja/modal. Dengan begitu, usaha Anda tetap tercatat aktif dan patuh melapor.

Bagaimana kalau usaha saya tidak berjalan lagi?

Selama izin usaha Anda masih aktif di OSS, laporan tetap wajib dibuat. Jika usaha benar-benar berhenti, maka Anda harus menutup atau mencabut izin di OSS. Dengan demikian kewajiban LKPM berhenti.

Apa yang dilaporkan di LKPM?

Isi LKPM mencakup:

- Realisasi investasi (uang yang sudah benar-benar dipakai untuk usaha, misalnya beli tanah, bangun gedung, beli mesin, modal kerja).
- Tenaga kerja (berapa orang yang dipekerjakan).
- Produksi atau penjualan (kalau sudah ada).
- Permasalahan usaha (kalau ada kendala, tulis supaya bisa jadi perhatian pemerintah).
- Data penanggung jawab usaha.

Angka yang diisi itu akumulasi dari awal usaha atau hanya periode berjalan?

Hanya untuk periode berjalan saja. Misalnya triwulan ini keluar Rp 50 juta, ya isi Rp 50 juta. Tidak perlu ditambah dengan belanja lama, karena sistem OSS sudah otomatis menghitung totalnya dari periode ke periode.

Saya punya beberapa KBLI (jenis usaha) dalam satu lokasi dan dengan menggunakan asset dan alat yang sama, apakah semua harus dilaporkan?

Ya, tetap harus dilaporkan. Caranya: pilih satu KBLI utama (yang paling besar atau dominan), lalu isi sesuai kegiatan dan belanja yang sebenarnya. Untuk KBLI lainnya yang pakai aset sama, cukup isi 0 dan tulis keterangan “sudah dilaporkan di KBLI utama”.

Apakah kolom keterangan wajib diisi?

Ya, wajib. Kolom ini penting untuk menjelaskan laporan Anda. Misalnya, “belanja digunakan untuk pembangunan gedung” atau “tidak ada kegiatan usaha pada periode ini”. Dengan begitu, laporan lebih jelas dan mudah dipahami.

Bagaimana jika perusahaan terlambat menyampaikan LKPM?

LKPM tidak dapat disampaikan diluar waktu yang telah ditentukan Peraturan BKPM No 5 Tahun 2021 (Pasal 32 ayat (6) dan (7)). Sehingga jika perusahaan terlambat menyampaikan LKPM, dapat diakumulasikan tambahan investasi dari seluruh periode yang terlewat. Hal ini berlaku juga bagi perusahaan yang baru pertama kali menyampaikan LKPM (mungkin karena ketidaktahuan/ kurangnya informasi mengenai penyampaian LKPM), maka nilai realisasi investasi yang dapat diakumulasi adalah total nilai investasi dari seluruh periode yang belum dilaporkan. Perusahaan dapat memberikan penjelasan pada kolom “Permasalahan yang Dihadapi Perusahaan”.

Contoh :

Perusahaan A lalai menyampaikan LKPM Periode Triwulan III, IV Tahun 2024 dan Triwulan I, II, III Tahun 2025. Pada awal Triwulan IV/2025 perusahaan mendapatkan Surat Peringatan dari BKPM. Setelah dicek di bagian keuangan Perusahaan A, didapatkan tambahan investasi selama Triwulan II/2024 s.d. Triwulan IV/2025 sebagai berikut:

No	Periode	Tambahan Investasi (Rp)
1	Triwulan III/ 2024	Pembayaran Biaya Notaris untuk pembuatan akta-akta → Modal Tetap (lain-lain): Rp. 20.000.000
2	Triwulan IV/ 2024	Pembelian Tanah → Modal Tetap: 2.000.000.000
3	Triwulan I/ 2025	Pembangunan Gedung → Modal Tetap: 500.000.000 Pembayaran tenaga kerja kontraktor → Modal Tetap (lain-lain): Rp. 50.000.000
4	Triwulan II/ 2025	Pembangunan Pabrik dan Gudang → Modal Tetap: 700.000.000 Pembayaran tenaga kerja kontraktor → Modal Tetap (lain-lain): Rp. 50.000.000
5	Triwulan III/ 2025	Pembelian Mesin/ Peralatan → Modal Tetap: 2.000.000.000

Maka :

Pada Periode Triwulan IV/2025 nilai investasi yang dapat diakumulasikan hanya tambahan investasi pada periode Triwulan I/2025 s.d. Triwulan IV/2025 (periode 1 tahun terakhir) yaitu:

MODAL TETAP:

Biaya Notaris :	Rp 20.000.000
Tanah :	Rp 2.000.000.000
Bangunan/ gedung :	Rp. 1.200.000.000
Mesin/ Peralatan & Suku Cadang :	Rp. 2.000.000.000
Lain-Lain :	<u>Rp. 200.000.000 +</u>
Total Modal Tetap yang dapat :	Rp. 5.420.000.000,-
diakumulasikan pada LKPM	
periode Triwulan IV/2025	

Contoh penjelasan pada kolom “Permasalahan yang Dihadapi Perusahaan”:

- Nilai tambahan investasi merupakan nilai akumulasi dari Periode Triwulan I/2025 s.d. Triwulan IV/2025.

Apakah saya bisa melihat laporan sebelumnya?

Bisa. Semua riwayat laporan Anda tersimpan di OSS. Jadi kapan saja Anda bisa membuka kembali laporan periode sebelumnya untuk mengecek data.

Apakah setelah mengirimkan LKPM berarti tanggung jawab perusahaan selesai?

TIDAK. Setelah mengirimkan LKPM secara online kepada BKPM, selanjutnya perusahaan WAJIB mengecek status LKPM yang disampaikan. Ada 4 (empat) status LKPM yang harus menjadi perhatian perusahaan:

1. Draft → LKPM belum terkirim ke BKPM, Draft LKPM dapat diedit dan dikirimkan kepada BKPM jika perusahaan sudah merasa yakin atas isian LKPM yang akan disampaikan
2. Terkirim → LKPM sudah terkirim ke BKPM, tapi belum direview oleh petugas/ PIC LKPM di BKPM
3. Perlu Perbaikan → LKPM yang dikirimkan ke BKPM sudah direview oleh petugas/ PIC LKPM, namun ada yang perlu diperbaiki
 - Untuk melihat apa yang perlu diperbaiki, perusahaan dapat membuka pada setiap step LKPM, lihat pada kolom “Catatan Perbaikan” ataupun cek notifikasi ke email penanggung jawab secara berkala.
 - Perusahaan dapat menjawab pertanyaan petugas/ PIC LKPM pada kolom “Permasalahan yang Dihadapi Perusahaan” di step “Realisasi”. Hal ini berfungsi karena kolom Permasalahan yang Dihadapi Perusahaan” dapat diprint/ dicetak, sehingga akan muncul pada saat LKPM dicetak.
 - Perlu diketahui berdasarkan pasal 35 ayat (3) Peraturan BKPM Nomor 5 tahun 2021, jika perusahaan tidak menjawab atau tidak melakukan perbaikan atas LKPM dengan status “Perlu Perbaikan” maka perusahaan dianggap tidak menyampaikan LKPM dimaksud.
4. Disetujui → LKPM yang telah dikirimkan kepada BKPM sudah direview dan disetujui oleh petugas/ PIC LKPM



Dukungan DPMPTSP



DPMPTSP Kabupaten Magelang adalah instansi yang memiliki tugas dan fungsi pada urusan Penanaman Modal, yaitu memberikan pelayanan perizinan dan pendampingan pelaporan, termasuk LKPM. Tujuannya supaya pelaku usaha menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

LAYANAN UNTUK PELAKU USAHA

Pendampingan & Konsultasi

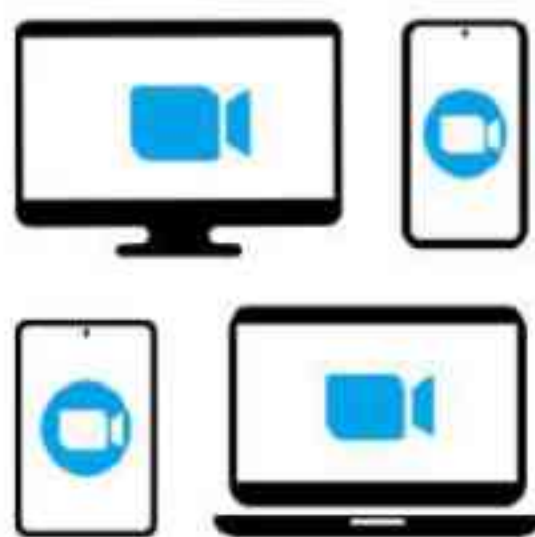


Jika merasa bingung atau ragu dalam mengisi LKPM, jangan khawatir. DPMPTSP Kabupaten Magelang menyediakan layanan pendampingan dan konsultasi. Anda bisa datang langsung ke kantor atau menghubungi petugas untuk dijelaskan langkah-langkah pengisian. Dengan layanan ini, pelaku usaha tidak perlu takut salah isi atau khawatir laporan ditolak.



Gerai LKPM

Setiap periode pelaporan, DPMPTSP membuka Gerai LKPM di Mal Pelayanan Publik. Pelaku usaha dapat langsung datang membawa data usahanya dan akan dibantu sampai laporan berhasil dikirim di sistem OSS. Layanan ini membantu pelaku usaha terutama yang kurang familiar dengan OSS atau baru pertama kali melapor.



Layanan Zoom

Selain datang langsung, DPMPTSP juga menyediakan sosialisasi online melalui aplikasi Zoom. Biasanya dilaksanakan awal periode pelaporan. Pelaku usaha bisa mendapatkan penjelasan teknis, tanya jawab, serta contoh langsung pengisian LKPM. Dengan cara ini, pelaku usaha bisa belajar dari rumah atau kantor tanpa harus datang ke DPMPTSP, sehingga lebih hemat waktu dan biaya.



Tanya Jawab Harian

Untuk permasalahan teknis yang sederhana, DPMPTSP juga melayani pertanyaan harian lewat telepon atau WhatsApp. Misalnya jika lupa cara login, lupa password OSS, atau ada data yang kurang jelas, Anda bisa langsung bertanya ke petugas. Layanan ini membuat pelaku usaha tidak perlu menunggu lama atau datang ke kantor hanya untuk masalah kecil.



dpmptsp
KABUPATEN MAGELANG

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif



Jln Soekarno - Hatta Nomor
20 Kota Mungkid



www.dpmptsp.magelangkab.go.id